

INDONESIANISASI ISLAM: PENGUATAN ISLAM MODERAT DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Toto Suharto

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Surakarta
email: tosu71@gmail.com

Abstract: *The history records that Islam entered Indonesia conducted through peaceful Da'wa. This peaceful Da'wa has given birth to the moderate Islam for Indonesian. The moderate Islam is the character of Indonesian Islam distinct from Islam elsewhere in the world. However, this character of the moderate Islam began to be challenged, since the transnational Islamic organizations into Indonesia. Here the ideological struggle occurred between Indonesianization of Islam and Islamisation of Indonesia. This article presents that Islamic education is an instrument of the most strategic in strengthening the moderate Islam that became the main character of Islam in Indonesia. The Islamic education organized by Islamic educational institutions of Indonesia typically, for sure, teach the learners about Indonesian Islam with its moderate character. At the same time, transnational Islamic educational institutions were trying to do Islamization of Indonesia to the learners. This struggle necessitates the importance of strengthening the role of Islamic educational institutions in conducting Indonesianization Islam so that moderate Islam can be maintained in the Archipelago.*

المخلص: سجّل البيان التاريخي أن الإسلام جاء إلي إندونيسيا علي سبيل الدعوة السّلمية. وقد تولّدت من هذه الدعوة السّلمية السمة الوسطية للإسلام الإندونيسي. وصارت هذه السمة الوسطية من مميّزات الإسلام الإندونيسي التي تخالف عن الإسلام في أي مكان آخر في هذا العالم. ومع ذلك، فإن هذه السمة للإسلام الإندونيسي قد واجهت هذه الأيام عدّة تحدّيات لاسيما بمجيء المنظمات الإسلامية عبر الوطنية في إندونيسيا، حتي يحدث الآن في هذا البلد المحبوب ما يسمي بالطعن الأيديولوجي بين نموذج «إندونيسية الإسلام» و نموذج «أسلمة إندونيسيا». وجدت هذه الدراسة أن

التربية الإسلامية هي من أفضل الاستراتيجيات وأحسنها في تقوية الإسلام الوسط في إندونيسيا. إن التربية الإسلامية التي قامت بها مؤسسات التربية الإسلامية «الاندونيسية» بالطبع تعلم لتعلمها الإسلام الوسط. وفي نفس الوقت، كانت مؤسسات التربية الإسلامية عبر الوطنية تسعى الي «أسلمة إندونيسيا» لتعلمها. يتطلب هذا الطعن الى أهمية تقوية دور مؤسسات التربية الإسلامية في سياق «إندونيسية الإسلام»، ليكون الإسلام الوسط مستمرا بل و يمكن الحفاظ عليه في هذا الأربيل.

Abstrak: Sejarah mencatat bahwa Islam masuk Indonesia dilakukan melalui dakwah yang penuh damai. Dakwah yang dilakukan penuh damai ini melahirkan Islam Indonesia yang moderat. Islam moderat ini pada gilirannya menjadi ciri khas Islam Indonesia, yang berbeda dengan Islam di belahan dunia lain. Namun, karakter Islam moderat ini mulai mendapat tantangan, semenjak organisasi Islam transnasional masuk ke Indonesia. Di sini terjadi pergumulan antara ideologi Indonesianisasi Islam dengan ideologi Islamisasi Indonesia. Kajian ini menemukan bahwa pendidikan Islam merupakan sarana yang paling strategis dalam memperkuat Islam moderat yang menjadi karakter utama bagi Islam Indonesia. Pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam yang khas Indonesia secara pasti mengajarkan kepada peserta didiknya mengenai Islam Indonesia yang moderat. Pada saat yang sama, lembaga pendidikan Islam transnasional pun berupaya melakukan Islamisasi Indonesia kepada peserta didiknya. Pergumulan ini meniscayakan pentingnya memperkuat peran lembaga pendidikan Islam dalam melakukan Indonesianisasi Islam, sehingga Islam moderat dapat dipertahankan di bumi Nusantara.

Keywords: Indonesianisasi Islam, Islam moderat, pendidikan Islam transnasional, lembaga pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 2 menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal ini jelas sekali menandakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang mendasari penyelenggaraan

pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam. Ketika Pancasila sejak 1945 didaulat oleh bangsa dan negara Indonesia sebagai ideologi negara, maka ideologi ini menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan selama bangsa dan negara ini masih bernama “Indonesia”. Hal ini menjadi penting, sebab Pancasila sampai saat ini terbukti telah mampu mempertemukan dan mempersatukan semua anak bangsa, terlepas dari adanya kritik dari kelompok tertentu di luar garis Pancasila.¹ Oleh karena itu, menjadi sangat logis bahwa sistem pendidikan nasional yang dibangun di Indonesia harus dijiwai dan berdasar pada sistem filsafat pendidikan Pancasila.²

Namun demikian, dewasa ini keberadaan ideologi Pancasila sedang dihadapkan pada berbagai tantangan. Menurut Syafiq Hasyim, tantangan kontemporer ideologi Pancasila saat ini adalah berasal dari kelompok revivalisme Salafi-Wahhabi yang sering melontarkan *a hate speech* terhadap Pancasila. Abu Bakar Ba’asyir, misalnya, dari Jemaah Islamiyah telah memandang Pancasila sebagai *kāfir (idolatry) ideology*, atau Abu Jibril dari MMI yang menyatakan “those who follow Pancasila as state ideology will go to the hell”. Kelompok Salafi-Wahhabi Indonesia ini termasuk yang paling agresif mempersuasi masyarakat Indonesia untuk menolak Pancasila.³ Demikian juga Hartono Ahmad Jaiz, tokoh DDII, yang berpandangan bahwa siapa yang mendukung negara sekuler Pancasila, berarti ia sama dengan *apostasy* (murtad). Hal ini karena kelompok Islamis menghendaki Indonesia sebagai negara Islam, bukan negara Pancasila yang menghargai pluralisme.⁴ Pengaruh paham Salafi-Wahhabi tampak juga dalam pemikiran Abdullah Sungkar yang menganggap kafir orang yang upacara bendera di sekolah sambil menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi Sungkar, menjadikan Pancasila sebagai sumber segala hukum di

¹Baca Nur Khalik Ridwan, “Pancasila dan Deradikalisasi Agama,” *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (Juni 2013): 185–186. Nur Khalik Ridwan di sini menyebutkan bahwa Irfan S. Awwas dan M. Tholib yang semangat mengkritik Pancasila, sehingga dalam salah satu editor bukunya mengaitkan Pancasila ini sebagai bagian dari Zionisme.

²Agus Sutono, “Meneguhkan Pancasila sebagai Filsafat Pendidikan Nasional,” *Jurnal Ilmiah CIVIS* 5, no. 1 (Januari 2015): 669.

³Syafiq Hasyim, “State and Religion: Considering Indonesian Islam as Model of Democratisation for the Muslim World” (the Colloquium on Models of Secularism, Berlin: the Friedrich Naumann Stiftung, 2013), 25–26.

⁴Lihat Ronald A. Lukens Bull, *Islamic Higher Education in Indonesia* (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 125.

Indonesia adalah sama dengan *idolatry*, karena telah menyamakan Pancasila dengan al-Qur'an dan Hadis.⁵

Beberapa pandangan yang “menggangu” Pancasila di atas pada gilirannya membuat suasana keagamaan di Indonesia yang dulunya sering dicap sebagai masyarakat beragama yang toleran dan penuh kedamaian, juga menjadi terganggu. Sebagaimana diketahui, secara historis, Islam masuk ke wilayah Nusantara dilakukan dengan damai, yang berbeda dengan Islamisasi di kawasan lain di belahan dunia Islam.⁶ Menurut Syafiq Hasyim, meskipun sejarawan masih berbeda pendapat mengenai kapan Islam datang ke Indonesia, tetapi kebanyakan sejarawan setuju bahwa proses yang damai adalah cara Islam masuk di kepulauan ini. Tidak ada perang dan ketegangan yang signifikan antara penyebar Islam dengan orang-orang lokal Nusantara yang sudah memiliki agama dan keyakinan terlebih dahulu. Saluran perdagangan, pernikahan, dan pertemuan budaya, serta unsur-unsur sufistik, merupakan cara yang efektif bagi pengislaman Indonesia, sehingga Islam Indonesia ini menjadi berwajah moderat, berbeda dengan wajah Islam di tempat lain.⁷

Proses Islamisasi dengan damai itu segera berubah ketika Indonesia memasuki era reformasi 1998. Di sini bermunculan aktor gerakan Islam baru yang berada di luar kerangka *mainstream* Islam Indonesia yang dominan, semisal Muhammadiyah, NU dan lain-lain. Gerakan Islam baru ini disebut sebagai gerakan Islam transnasional, yaitu kelompok keagamaan Islam yang memiliki jaringan internasional, yang datang ke suatu negara dengan membawa paham keagamaan (ideologi) baru dari negeri seberang (Timur Tengah), yang dinilai berbeda dari paham keagamaan lokal yang lebih dahulu eksis. Kelompok atau gerakan yang dianggap transnasional adalah Ikhwanul Muslimin (Gerakan Tarbiyah) dari Mesir, Hizbut Tahrir dari Lebanon (Timur Tengah), Salafi dari Saudi Arabia, Syiah dari Iran dan Jamaah Tabligh dari India/Banglades. Kelima gerakan atau

⁵Solahudin, *The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema'ah Islamiyah*, trans. oleh Dave McRae (Sydney: University of New South Wales Press Ltd, 2013), 87.

⁶Lihat Thomas W. Arnold, *Sejarah Da'wah Islam*, trans. oleh A. Nawawi Rambe (Jakarta: Widjaya, 1985), 352.

⁷Hasyim, “State and Religion: Considering Indonesian Islam as Model of Democratisation for the Muslim World,” 11.

kelompok keagamaan ini saat ini sudah ada di Indonesia.⁸ Karena memiliki pandangan dunia tentang dakwah yang berbeda dengan kelompok *mainstream* Islam, di beberapa tempat, muncul kasus berupa letupan reaksi masyarakat terhadap eksistensi kelompok Islam transnasional ini.

Dengan demikian di Indonesia dewasa ini, terdapat dua paradigma berbeda dalam proses pengislaman. Kelompok Islam *mainstream* melakukannya dengan paradigma “Indonesianisasi Islam”, sementara kelompok Islam transnasional melakukannya dengan paradigma “Islamisasi Indonesia”. Kedua paradigma pengislaman ini kini saling berebut Islam Indonesia melalui salurannya masing-masing, utamanya melalui lembaga pendidikan Islam sebagai langkah yang paling strategis. Tulisan ini dengan analisis isi terhadap sumber-sumber dokumen, bermaksud mendeskripsikan peran lembaga pendidikan Islam dalam memperkuat karakter Islam Indonesia yang moderat melalui paradigma “Indonesianisasi Islam”.

PARADIGMA “INDONESIANISASI ISLAM” DAN ISLAM MODERAT⁹

Istilah “Indonesianisasi” muncul kali pertama sejak Christian Snouck Hurgronje diangkat oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai Penasehat Urusan Arab dan Pribumi pada 11 Januari 1899. Oleh Hurgronje, “Indonesianisasi” digunakan sebagai sarana politik untuk menciptakan masa depan Hindia Belanda yang modern dan maju. Dia menginginkan adanya proses “Indonesianisasi”, yaitu penguasa Belanda di Indonesia didorong untuk memiliki rasa tanggung jawab moral dalam mengangkat harkat penduduk tanah jajahannya, sebab dia tidak menaruh kepercayaan kepada Islam sebagai kekuatan yang dapat membawa kepada kemajuan.¹⁰ Tujuan dari “Indonesianisasi” *ala* Hurgronje ini adalah mengikis habis pengaruh Islam dengan

⁸Ahmad Syafi’i Mufid, ed., *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2011), 215–216.

⁹Sebagian diskusi tentang Islam moderat diambil dari Toto Suharto, “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia,” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (September 2014): 87–90.

¹⁰Baca Effendi, “Politik Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje),” *Jurnal TAPIS* 8, no. 1 (Juni 2012): 101.

memajukan kebudayaan Barat melalui pendidikan dan pengajaran,¹¹ sehingga semuanya serba-Indonesia, bukan serba-Islam.

Dari ranah politik, istilah “Indonesianisasi” kemudian bergeser digunakan dalam ranah ekonomi. Menurut J. Thomas Lindblad, istilah ini digunakan untuk menganalisis ekonomi Indonesia di masa transisi dari penjajahan Belanda ke Orde Lama. Pada masa ini, istilah ini dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk menggeser dan menguasai perusahaan-perusahaan milik Kolonial Belanda agar menjadi milik pribumi.¹² Kemudian di masa Orde Baru, istilah ini digunakan oleh Kuntowijoyo dalam ranah Islam pada 1984 untuk menolak fiqh Indonesia yang digagas Prof. Hasbi Ash- Shiddieqy. Kuntowijoyo misalnya menulis:

“Dalam konteks Indonesianisasi, Islam telah menimbulkan perlawanan pada tingkat tertentu. Dengan kata lain, rasionalisasi Islam telah jatuh, menjadi mistis, dan lokal dalam hal budaya. Karena itu, kita bisa bertanya, jika seseorang ingin Indonesia ‘menjadi’ Islam, maka arah mana yang harus ia tempuh?... karena Islam di Indonesia telah jatuh dari universal ke tahap lokal? Jika harus ada Indonesianisasi, lalu apa bentuknya (dari Islam yang diindonesiakan) itu?”¹³

Pada perkembangan mutakhir, istilah “Indonesianisasi” digunakan dalam konteks gerakan Islam Indonesia, untuk melihat bagaimana proses mengindonesiakan Islam di Indonesia. Istilah ini menjadi berlawanan dengan istilah “Islamisasi” yang bermaksud melakukan proses mengislamkan Indonesia, dalam artian Islam yang serba-Arab. Dalam konteks ini, Mujiburrahman membedakan antara “Mengindonesiakan Islam” dengan “Mengislamkan Indonesia”. Baginya, “Mengindonesiakan Islam” merupakan paradigma dan strategi gerakan Islamisasi di Indonesia yang sifatnya non-ideologis,

¹¹Ibid., 102.

¹²J. Thomas Lindblad, “The Importance of Indonesianisasi during the Transition from the 1930s to the 1960s” (Conference on Economic Growth and Institutional Change in Indonesia in the 19th and 20th Centuries, Amsterdam, 2002). Untuk Indonesianisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Bali masa Orde Lama, lihat misalnya I Ketut Ardhana, “Nasionalisasi Perusahaan: Peralihan dari Perusahaan Belanda ke Perusahaan Lokal di Bali,” in *Membuka Jalan Keilmuan: Kusumanjali 80 Tahun Prof. Dr. Anak Agung Gde Putra Agung, S.U.*, ed. oleh A.A.A. Dewi Girindrawardani dan Slamet Trisila (Denpasar: Pustaka Larasan, 2015), 37–57.

¹³Dikutip dari Mansur, “Kontekstualisasi Gagasan Fiqh Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Telaah atas Pemikiran Kritis Yudian Wahyudi),” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 46, no. 1 (Juni 2012): 30.

dalam arti Islamisasi dilakukan secara kultural, yakni Islam yang ingin dikembangkan dalam ranah kultural, di luar struktur kekuasaan negara, tetapi tetap kritis terhadap negara. Gerakan Islam non-ideologis ini sering “berebut” dengan gerakan Islam ideologis, terutama menyangkut perdebatan seputar ideologi negara, antara negara Islam atau negara sekuler. Kompromi ideologis keduanya melahirkan bahwa Indonesia adalah “negara bukan-bukan”, bukan negara sekuler, bukan pula negara agama. Di dalam konsep negara seperti ini terdapat wilayah remang-remang, yang memungkinkan kedua kelompok berkompromi, pada saat yang sama juga bersitegang.¹⁴

Sementara itu, “Mengislamkan Indonesia” merupakan paradigma dan strategi gerakan Islamisasi yang lebih ideologis, yaitu berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara Islam melalui *khilāfah Islāmiyyah*. Paradigma gerakan ini mencuat ke permukaan semenjak era reformasi, yang didukung oleh gerakan Islam ideologis, yang dulunya tertekan dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Angin reformasi telah memberikan kebebasan bagi kelompok Islam ideologis untuk tampil ke ruang publik. Sebagian mereka berasal dari aktivis dakwah kampus seperti KAMMI dan PKS, sebagian lagi berasal dari Hizbut Tahrir, dan sebagian lagi berasal dari gerakan terorisme *ala* Amrozi dan Imam Samudera yang menempuh jalur Islam garis keras.¹⁵

Dengan demikian, “Indonesianisasi Islam” lebih merupakan paradigma dan strategi gerakan kultural yang digunakan oleh kelompok Islam non-ideologis, dengan tujuan untuk mempertahankan Islam Indonesia sebagai Islam yang memiliki karakter khas Indonesia, yaitu moderat, ramah, toleran. “Indonesianisasi Islam” oleh karenanya berbeda dengan “Islamisasi Indonesia” yang berwatak ideologis, bermaksud mengubah ideologi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan konsep *khilāfah Islāmiyyah*, agar Indonesia menjadi negara Islam.

Indonesia adalah “negerinya kaum Muslim moderat”,¹⁶ demikian penilaian Abdurrahman Wahid. Sejak masa pasca-Soeharto, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan negara

¹⁴Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi*, 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 271–276.

¹⁵Ibid., 277.

¹⁶Penilaian ini diberikan Abdurrahman Wahid, ketika melihat perkembangan Islam Indonesia. Baca Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 60.

demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat, diharapkan dapat memainkan peran lebih besar di dalam menyebarkan Islam *wasatiyyah*. Azyumardi Azra memandang bahwa Islam Indonesia adalah “*Islam with a smiling face*” yang penuh damai dan moderat, sehingga tidak ada masalah dengan modernitas, demokrasi, HAM dan kecenderungan-kecenderungan lain di dunia modern.¹⁷

Keberadaan karakter moderat bagi Islam Indonesia ini telah dipertegas oleh Presiden Joko Widodo pada pidato pembukaan MTQN ke-26 di Mataram, 30 Juli 2016. Menurut Presiden, sekarang saatnya Indonesia menjadi sumber pemikiran Islam, sekaligus menjadi sumber pembelajaran Islam bagi dunia. “Negara-negara lain harus juga melihat dan belajar Islam dari Indonesia, karena Islam di Indonesia itu sudah seperti resep obat yang paten, yaitu Islam *Wasatiyyah*, Islam Moderat. Sedangkan negara-negara lain masih mencari-cari formulanya”, demikian menurut Presiden.¹⁸ Untuk mewujudkan karakter ini, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), yang diharapkan menjadi menjadi sumber ilmu Islam, sumber cahaya moral Islam, dan benteng bagi tegaknya nilai-nilai Islam yang berkeimbangan (*tawāzun*), Islam yang toleran (*tasāmuḥ*), dan Islam yang egaliter (*musāwāh*).

Dengan mengutip pandangan John L. Esposito, Masdar Hilmy menyebutkan bahwa terma “moderat” dan “moderatisme” merupakan nomenklatur konseptual yang sulit didefinisikan. Terma ini diperebutkan oleh kelompok agama ataupun para ilmuwan, sehingga dimaknai secara berbeda-beda, tergantung siapa dan dalam konteks apa ia dipahami.¹⁹ Kesulitan pemaknaan ini disebabkan karena khazanah pemikiran Islam Klasik tidak mengenal istilah “moderatisme”. Penggunaan dan pemahaman atasnya biasanya merujuk pada padanan sejumlah kata dalam bahasa Arab, di

¹⁷Azyumardi Azra, “Bali and Southeast Asian Islam: Debunking the Myths,” in *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*, ed. oleh Kumar Ramakrishna dan See Seng Tan (Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2003), 45.

¹⁸Presiden Jokowi, “Indonesia Sumber Pemikiran Islam Dunia,” diakses 9 September 2016, <https://www.kemenag.go.id/berita/387579/presiden-jokowi-indonesia-sumber-pemikiran-islam-dunia>.

¹⁹Masdar Hilmy, “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU,” *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1 (Juni 2013): 25.

antaranya *al-tawassuṭ* atau *al-wasaṭ* (moderasi), *al-qisṭ* (keadilan), *al-tawāzun* (keseimbangan), *al-i'tidāl* (keselarasan/kerukunan), dan semacamnya.²⁰ Namun demikian, dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa karakteristik moderatisme Islam. Hilmy menulis:

“The concept of moderatism in the context of Indonesian Islam has at least the following characteristics; 1) non-violent ideology in propagating Islam; 2) adopting the modern way of life with its all derivatives, including science and technology, democracy, human rights and the like; 3) the use of rational way of thinking; 4) contextual approach in understanding Islam, and; 5) the use of *ijtihād* (intellectual exercises to make a legal opinion in case of the absence of explicit justification from the Qur’ān and Ḥadīth). Those characteristics are, however, can be expanded into several more characteristics such as tolerance, harmony and cooperation among different religious groups”.²¹

Sementara itu, Muhammad Ali memaknai Islam moderat sebagai “those who do not share the hard-line visions and actions”.²² Dia menyatakan bahwa Islam moderat di Indonesia merujuk pada komunitas Islam yang menekankan pada perilaku normal (*tawassuṭ*) di dalam mengimplementasikan ajaran agama yang mereka tegakkan; mereka toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, dan memprioritaskan pemikiran dan dialog sebagai strateginya. Mereka adalah *mainstream* Islam Indonesia, meskipun gerakan strategisnya untuk memoderasi keagamaan dan politik masih dinilai terbatas. Gagasan-gagasan semisal “Islam Pribumi”, “Islam Rasional”, “Islam Progresif”, “Islam Transformatif”, “Islam Liberal”, “Islam Inklusif”, “Islam Toleran”, dan “Islam Plural”, yang muncul sejak tahun 1970-an dapat dikategorikan sebagai Islam moderat Indonesia. Kategori yang sama juga dapat disematkan pada gagasan-gagasan reaktualisasi Islam, nasionalisasi Islam, desakralisasi budaya Islam, atau ijtihad kontekstual.²³

Berbeda dengan Muhammad Ali yang lebih menekankan pada substansi karakter Islam moderat, Ahamd Najib Burhani memaknai

²⁰Ibid., 27.

²¹Ibid., 28.

²²Muhammad Ali, “Moderate Islam Movement in Contemporary Indonesia,” in *Islamic Thoughts and Movements in Contemporary Indonesia*, ed. oleh Rijal Sukma dan Clara Joewono (Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 2007), 198.

²³Ibid., 199.

Islam moderat lebih pada makna bahasanya, yaitu sebagai “*mid-position between liberalism and Islamism*”. Orang atau organisasi yang berada di tengah-tengah antara liberalisme dan Islamisme adalah moderat.²⁴ Dengan demikian, bagi Burhani, Islam moderat Indonesia adalah bukan liberal dan juga bukan Islamis.

Dari beberapa pandangan mengenai Islam moderat di atas, penulis lebih setuju pada hakikat atau substansi Islam moderat, yang oleh al-Qur’an disebut sebagai *rahmah li al-‘ālamīn* (QS. al-Anbiyā: 107). Dengan pemaknaan ini, Islam moderat bagi Indonesia adalah Islam yang bukan ekstrem atau radikal, yang senantiasa tidak menekankan pada kekerasan atau tidak menempuh garis keras di dalam mengimplementasikan keberislamannya. Kelompok Islam liberal atau kelompok Islamis, selama mereka menempuh jalur yang bukan *rahmah*, maka itu bukan dikategorikan Islam moderat. Islam moderat ini ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu berperilaku normal (*tawassuṭ*) di dalam mengimplementasikan ajaran agama, toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, memprioritaskan dialog, mengakomodir konsep-konsep modern yang secara substansial mengandung masalah, berpikir rasional berdasarkan wahyu, menafsirkan teks secara kontekstual, dan menggunakan ijtihad di dalam menafsirkan apa yang tidak termaktub di dalam al-Qur’an atau Sunnah. Dengan karakter ini, Islam moderat adalah mereka yang memiliki sikap toleran, rukun dan kooperatif dengan kelompok-kelompok agama yang berbeda. Inilah watak *rahmah* bagi Islam moderat Indonesia, yang lebih bermakna teologis, daripada politis yang sering diwacanakan oleh Amerika Serikat ketika memaknai Islam moderat.²⁵

PENDIDIKAN ISLAM TRANSNASIONAL SEBAGAI TANTANGAN

Pada tahun 2011 penulis telah melakukan penelitian disertasi tentang pendidikan berbasis masyarakat dengan kasus Pesantren Persatuan

²⁴Ahmad Najib Burhani, “Pluralism, Liberalism and Islamism: Religious Outlook of the Muhammadiyah Islamic Movement in Indonesia” (Tesis, Faculty of Humanities, University of Manchester, 2007), 16.

²⁵Lihat pemaknaan Islam moderat yang teologis, bukan politis, oleh Ahmad Najib Burhani, “Al-Tawassuṭ wa-l I’tidāl: The NU and Moderatism in Indonesian Islam,” *Asian Journal of Social Science* 40, no. 5–6 (2012): 564–581.

Islam di masa Orde Baru, khususnya di masa kepemimpinan KH. A. Latief Muchtar, M.A.²⁶ Salah satu temuan penelitian ini adalah adanya kategorisasi pendidikan berbasis masyarakat dalam dua kategori, yaitu pendidikan berbasis masyarakat organik dan pendidikan berbasis masyarakat tradisional. Pendidikan berbasis masyarakat organik adalah pendidikan yang betul-betul segala kebijakannya dibuat ‘dari’, ‘oleh’, dan ‘bersama-sama’ untuk memihak masyarakat, sebagaimana keberpihakan intelektual organik terhadap pemberdayaan *civil society*. Pendidikan berbasis masyarakat organik ini menjadi berbeda dengan pendidikan berbasis masyarakat tradisional yang menjadi “deputi” atau penyambung ideologi hegemoni negara.

Contoh yang dapat dikemukakan bagi pendidikan berbasis masyarakat organik adalah lembaga pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum tersendiri, tidak mengikuti kurikulum pendidikan nasional. Adapun pesantren yang menyelenggarakan pendidikan, baik berupa sekolah maupun madrasah, dengan mengikuti kurikulum nasional pemerintah, maka pesantren tipe ini masuk dalam kategori pendidikan berbasis masyarakat tradisional, karena menjadi deputi pemerintah. Jadi, jelas tidak semua pesantren menerapkan sepenuhnya konsep pendidikan berbasis masyarakat organik. Pesantren-pesantren yang kurikulumnya mengikuti pola kurikulum pemerintah secara nasional, masuk dalam kategori pendidikan berbasis masyarakat tradisional.

Temuan disertasi penulis tentang pendidikan berbasis masyarakat organik di atas kiranya merupakan bentuk perwujudan dari konsepsi demokratisasi pendidikan, yang meniscayakan adanya segala kebijakan pendidikan ditentukan oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah, karena memang masyarakat adalah “tuan” dan “empunya” bagi pendidikan yang diselenggarakannya. Dengan demikian, urgensi pendidikan berbasis masyarakat organik ini terletak pada keberadaan masyarakat agar menjadi pemilik bagi pendidikannya secara utuh, tanpa ada intervensi dan campur tangan pemerintah di dalamnya.

²⁶Toto Suharto, “Pesantren Persatuan Islam 1983-1997 dalam Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat” (Disertasi, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011).

Pendidikan Islam transnasional yang kini menjamur di Indonesia kiranya dapat dikategorikan sebagai pendidikan berbasis masyarakat organik, karena pendidikan model ini dilaksanakan dari, untuk dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Organisasi-organisasi transnasional yang memang memiliki watak ideologis, sejak awal reformasi 1998, sudah mulai masuk ke Indonesia dengan menancapkan unsur-unsur ideologisnya melalui lembaga pendidikan sebagai alat penyemainya. Di Indonesia, telah ditemukan banyak lembaga-lembaga pendidikan swasta bercorak ideologis, yang memang mengikuti corak ideologi organisasi induknya. Pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi Islam transanional ini, atau sebut saja “pendidikan Islam transnasional”, tentu saja sangat dimungkinkan memiliki ideologi pendidikan yang berbeda atau berseberangan dengan ideologi pendidikan nasional. Karena bagaimanapun juga, lembaga-lembaga tersebut sudah pasti secara ideologis hanya menyemaikan perspektif ideologinya kepada peserta didik. Ketika ini terjadi, maka pendidikan Islam transnasional dengan sendirinya menjadi tantangan bagi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan ini?

INSTALASI ISLAM MODERAT DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Instalasi penguatan paham Islam moderat dalam lembaga pendidikan Islam perlu dilakukan. Menurut Syamsul Arifin, peran dunia pendidikan dapat diplot sebagai salah satu institusi yang dapat dioptimalisir untuk melakukan apa yang disebut dengan deradikalisasi. Peran pendidikan terutama yang dikelola oleh umat Islam diharapkan dapat melakukan peran tersebut, bersama institusi lainnya, sehingga wajah Islam di Indonesia tetap terlihat ramah, toleran, moderat, namun tetap memiliki martabat di mata dunia.²⁷ Karenanya, lembaga pendidikan Islam memiliki andil dan peran yang sangat strategis bagi penguatan karakter moderat ini.

Dalam rangka “Indonesianisasi Islam” untuk memperkuat Islam moderat, lembaga pendidikan Islam dapat menginstall ideologi Islam moderat kepada peserta didiknya. Instalasi ini dapat

²⁷Syamsul Arifin, “Membendung Arus Radikalisasi di Indonesia,” *Islamica* 8, no. 2 (Maret 2014): 416.

dilakukan dengan mengikuti kerangka Gerald L. Gutek tentang ideologi pendidikan. Menurutnya, suatu ideologi pendidikan, apapun bentuknya, dapat diwujudkan dalam tiga hal, yaitu: (1) di dalam menentukan kebijakan dan tujuan pendidikan, (2) di dalam penyampaian nilai-nilai yang tersembunyi dalam *hidden curriculum*, (3) dan di dalam formulasi kurikulum itu sendiri.²⁸ Ketiga aspek ini senantiasa dipengaruhi dan ditentukan bentuk dan formatnya oleh ideologi pendidikan yang dianut oleh suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, dalam instalasi ideologi Islam moderat, ketiga aspek ini menjadi catatan yang harus diperhatikan.

1. Penekanan pada Islam Moderat dalam Merumuskan Tujuan Pendidikan

Salah satu kunci untuk memahami tujuan pendidikan adalah bahwa tujuan itu harus baik. Menurut Noeng Muhadjir, makna “baik” secara filosofis mencakup etiket, *conduct* (prilaku terpuji), *virtues* (watak terpuji), *practical values*, dan *living values*. Agar peserta didik menjadi pandai, ahli, bertambah cerdas, berkepribadian luhur, toleran, pandai membaca dan banyak lagi, merupakan contoh tujuan baik dalam pendidikan.²⁹ Sementara itu, menurut John Dewey, setiap tujuan pendidikan harus mengandung nilai yang dirumuskan melalui observasi, pilihan dan perencanaan, yang dilaksanakan dari waktu ke waktu. Apabila tujuan itu tidak mengandung nilai, bahkan dapat menghambat pikiran sehat peserta didik, maka itu dilarang.³⁰ Dengan ini, dalam merumuskan tujuan pendidikan, konsep “baik” dan konsep “nilai” menjadi penting. Kedua konsep ini tentu saja sangat ideologis, tergantung filsafat dan ideologi yang dianut oleh sebuah lembaga pendidikan. Filsafat dan ideologi tentang konsep nilai dan konsep baik inilah yang untuk kemudian diterjemahkan dalam merumuskan sebuah tujuan pendidikan.

Lembaga pendidikan Islam secara ideologis dapat menginstallkan konsep “baik” dan konsep “nilai” yang ada dalam paham Islam moderat ke dalam tujuan pendidikannya, sehingga menghasilkan

²⁸Gerald L. Gutek, *Philosophical and Ideological Perspectives on Education* (New Jersey: Pentice-Hal, 1988), 160–162.

²⁹Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, V (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), 1–2.

³⁰John Dewey, *Democracy and Education* (New York: The Macmillan Company, 1964), 107.

pendidikan Islam moderat. Menurut Abudin Nata, pendidikan Islam moderat atau disebutnya sebagai pendidikan Islam *rahmah li al-'ālamīn*, memiliki sepuluh nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu: (1) pendidikan damai, yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama; (2) pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri; (3) pendidikan yang memperhatikan visi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi untuk perubahan sosial; (4) pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan pluralisme; (5) pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi *mainstream* Islam Indonesia yang moderat; (6) pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual (*head*), wawasan spiritual dan akhlak mulia (*heart*) dan keterampilan vokasional (*hand*); (7) pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama; (8) pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran; (9) pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif; dan (10) pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.³¹

Dari sepuluh nilai dasar di atas, poin 1, 3, 4, dan 5 perlu mendapat perhatian khusus dalam perumusan tujuan pendidikan Islam di Indonesia. Keempat poin ini menjadi penting, karena ia menjadi penciri bagi kekhasan Islam Indonesia, yang berbeda dengan keislaman di negara lain. Pendidikan damai, pendidikan profetik, pendidikan toleransi dan pluralisme, serta pendidikan yang mengarusutamakan paham keislaman-keindonesiaan, perlu mendapat dukungan dari sisi kebijakan dan manajerial. Lembaga pendidikan Islam, baik sekolah, madrasah, atau pesantren perlu menekankan keempat poin ini dalam instalasi tujuan pendidikannya. Keempat poin inilah yang mencoba mengintegrasikan antara aspek keislaman dengan aspek keindonesiaan dalam bidang pendidikan, sehingga Islam moderat yang menjadi karakter Islam Indonesia mendapat penguatan dari sisi pendidikan. Pendidikan Islam transnasional yang ada di Indonesia sedikit-banyak tidak memperhatikan integrasi

³¹Abudin Nata, "Islam Rahmatan li al-'Alamin sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community" (Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 7 Maret 2016), 10-14.

keislaman-keindonesiaan ini, karena lembaga pendidikan jenis ini mengabaikan penggunaan paradigma “Mengindonesiakan Islam”, tetapi menggunakan paradigma “Mengislamkan Indonesia” sesuai visi ideologisnya.

2. Filterisasi Materi Ajar pada Islam Moderat dalam Konten Kurikulum

Kurikulum pendidikan juga bersifat ideologis. Paradigma baru pendidikan mengartikan kurikulum secara luas, yaitu sebagai semua yang menyangkut aktivitas yang dilakukan dan dialami pendidik dan peserta didik, baik dalam bentuk formal maupun nonformal, guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dalam paradigma baru bukan hanya sebagai program pendidikan, tetapi juga sebagai produk pendidikan, sebagai hasil belajar yang diinginkan dan sebagai pengalaman belajar peserta didik.³² Menurut S. Nasution, di dalam menyusun atau merevisi sebuah kurikulum pendidikan, ada empat asas yang perlu diperhatikan, yaitu asas filosofis yang berkaitan dengan filsafat dan tujuan pendidikan, asas psikologis menyangkut psikologi belajar dan psikologi anak, asas sosiologi menyangkut perubahan dalam masyarakat, dan asas organisatoris berkaitan dengan bentuk dan organisasi kurikulum.³³ Asas filosofis kurikulum inilah kiranya yang merupakan ajang penyemaian suatu ideologi pendidikan kepada peserta didik.

Muatan kurikulum dengan demikian menjadi aspek penting dalam instalasi ideologi Islam moderat. Dewasa ini materi ajar pendidikan Islam tersebar bukan hanya dalam bentuk cetak, tetapi juga digital. Lembaga pendidikan Islam harus mampu memilah dan memfilter mana materi ajar yang memuat ideologi Islam moderat dan mana yang bukan. Kelompok-kelompok gerakan Islam ideologis sudah melakukan penyebaran ideologinya melalui penerbitan dan penerjemahan karya-karya yang sesuai ideologinya ke dalam bahasa Indonesia. Demikian juga mereka telah mengonlinekan ajaran-ajaran ideologisnya berupa bahan digital, yang tersebar dalam situs-situs internetnya.

Pada tahun 2008, *International Crisis Group* (ICG) melaporkan beberapa penerbit yang ditengarai sebagai perusahaan penerbitan

³²Suryanto dan Jihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), 59–60.

³³S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, VI (Bandung: Jemmars, 1982), 21–24.

yang memiliki kaitan dengan kelompok radikal Jama'ah Islamiyah (JI). Kebanyakan penerbit ini terletak di wilayah Solo Raya, dan tidak memiliki kaitan dengan IKAPI, tetapi masuk dalam Serikat Penerbit Islam (SPI). Beberapa rumah penerbitan yang dicatat oleh ICG adalah Al-Alaq, Kelompok Penerbit Arafah, Kelompok Penerbit Al-Qawam, Kelompok Penerbit Aqwam, Kafeyah Cipta Media, Ar-Rahmah Media, serta beberapa penerbit lain di wilayah Solo seperti Pustaka Al-Amin, Abyan, Pustaka Iltizam, Ziyad Visi Media, Ad-Dakwah, dan WAFI Press.³⁴

Sementara itu, kajian Abdul Munip menyebutkan beberapa situs yang ditengarai sebagai situs yang menginformasikan hal-hal terkait radikalisme, yaitu: (1) situs www.arahmah.com, yang memuat berita dan artikel jihad di seluruh dunia; (2) situs www.thoriqua.wordpress.com, yang mempersilahkan pengakses untuk mengunduh artikel maupun e-book tentang jihad, bahkan ada juga informasi intelijen, terjemahan dari *The Security and Intelligence Course*, karya Abu Abdullah bin Adam; (3) situs www.jihad.hexat.com, yang memuat artikel-artikel jihad dan buku karya Abu Mush'ab al-Syuri yang berjudul *Da'wah Muqāwamah Islāmiyyah 'Ālamiyyah* (DMIA); (4) situs <http://almuwahhidin.wordpress.com>, yang memuat buletin terbitan Jama'ah Anshoru Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Baasyir; (5) situs www.millahibrahim.wordpress.com, yang menyediakan file unduhan berisi ceramah-ceramah kajian terhadap buku-buku jihad oleh Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman, yang kini sedang meringkuk di penjara karena keterlibatannya dalam pelatihan bersenjata di Aceh; dan (6) situs <http://alqoidun.sitesled.com/heart.php-hid=1.htm>, yang mengonlinekan buku *Yang Tegar di Jalan Jihad* karya Al-Syahid Al-Syaikh Yusuf bin Sholih al-'Uyairi, dan *Terorisme adalah Ajaran Islam* karya Syaikh 'Allamah Abdul Qodir bin Abdul Aziz.³⁵

Terkait dengan bahan ajar cetak, pada 2016 PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Syarif Hidayatullah melakukan kajian tentang dugaan adanya muatan ajaran intoleran dan kekerasan yang terdapat dalam materi ajar buku teks mata pelajaran

³⁴International Crisis Group, "Indonesia: Industri Penerbitan Jemaah Islamiyah," *Crisis Group Asia Report* 147 (Pebruari 2008): 2–12.

³⁵Abdul Munip, "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (Desember 2012): 171–174.

Pendidikan Agama Islam (PAI) terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan di sekolah-sekolah seperti SD, SMP dan SMA di Indonesia. Kajian ini di antaranya menyimpulkan bahwa: (1) terdapat muatan ajaran intoleransi pada buku-buku teks tersebut, yang tercermin dalam bentuk menyalahkan pendapat atau praktik ibadah yang berbeda, mempromosikan pendapat yang satu tanpa menghadirkan pendapat lainnya, memuat pandangan negatif atau *stereotip* tentang umat lain tanpa menegaskan Islam menghormati kebebasan berkeyakinan dan tanpa menegaskan bahwa antar umat beragama harus rukun dan secara sosial harus bahu membahu sebagaimana Islam ajarkan; (2) negara tidak menjadikan produksi buku teks PAI tersebut sebagai bagian dari politik kebudayaan nasional untuk pembangunan karakter bangsa; dan (3) terdapat ketidaktegasan visi, misi, dan tujuan buku-buku teks PAI tersebut, sehingga tidak memuat ajaran dan pesan Islam yang *rahmah li al-'alamīn* sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, yang pada gilirannya buku-buku teks tersebut tidak jelas, tidak koheren, dan atau bahkan kontradiktif dengan keislaman Indonesia.³⁶ Temuan PPIM ini menjadi indikator adanya paham intoleran dan kekerasan yang ”menyusup” dalam bahan ajar cetak pelajaran PAI di sekolah.

Kajian mutakhir yang dilakukan oleh Hasniati pada 2017 tentang muatan radikalisme, toleransi dan demokrasi dalam buku teks PAI SMA terbitan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, Erlangga dan Yudhistira menunjukkan bahwa: (1) terdapat nilai-nilai radikalisme dalam buku teks PAI terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Erlangga dan Yudhistira. Sedangkan nilai-nilai toleransi dan demokrasi dalam buku teks yang diterbitkan oleh ketiga penerbit di atas ialah adanya penekanan pentingnya perdamaian, persatuan, sikap saling menghargai dan saling menghormati, musyawarah, kebebasan berpendapat dan beragama; (2) Buku teks yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Erlangga dan Yudhistira pada dasarnya banyak mengandung muatan toleransi dan demokrasi. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa buku teks PAI dari ketiga penerbit tersebut juga mengandung muatan

³⁶Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta, “Tanggung Jawab Negara terhadap Pendidikan Agama Islam,” *Policy Brief*, September 2016, 1–8. Hasil kajian ini dapat juga dilihat pada Abdullah, “Exclusivism and Radicalism in Schools: State Policy and Educational Politics Revisited,” *Studia Islamika* 23, no. 3 (2016): 625–632.

radikalisme. Yang paling miris, ternyata muatan radikalisme paling banyak ditemukan dalam buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.³⁷

Kajian-kajian di atas jelas sekali memperlihatkan bahwa di dalam buku teks PAI terdapat paham dan ajaran radikalisme yang disusupkan ke dalamnya. Paham dan ajaran radikalisme tentu saja tidak selaras dengan karakter Islam Indonesia yang moderat. Di sinilah letak pentingnya penggunaan paradigma ”mengindonesiakan Islam” dalam menyusun dan membuat buku ajar pendidikan yang mencerminkan Islam moderat. Kurikulum pendidikan harus steril dari ajaran dan paham radikalisme. Lembaga pendidikan dituntut untuk mampu memfilterisasi karya-karya tersebut, baik cetak ataupun online, agar tidak diajarkan dalam lembaga pendidikan Islam moderat. Dalam konteks ini, seorang pendidik moderat, perlu memiliki kemampuan dan keluasan wawasan untuk menyaring penerbitan dan situs yang tidak moderat, agar tidak diajarkan kepada peserta didik.

3. Internalisasi Nilai-Nilai Islam Moderat dalam Mendesain Kurikulum Tersembunyi

Hal yang sama bersifat ideologis adalah merancang kurikulum tersembunyi. Menurut Michael W. Apple, *hidden curriculum* dapat diartikan sebagai norma-norma dan nilai-nilai yang secara implisit, tapi efektif, diajarkan sekolah kepada siswa yang biasanya tidak dicantumkan di dalam tujuan guru mengajar secara formal. Kurikulum semacam ini justru yang sebenarnya memiliki kontribusi yang signifikan bagi upaya melestarikan ideologi secara hegemonik.³⁸ Oleh karena itu, analisis ideologi dapat menelanjangi fungsi-fungsi kurikulum, di mana melalui *hidden curriculum*, setiap sistem pendidikan sesungguhnya menyembunyikan ideologi tertentu dalam rangka reproduksi budaya.

Menurut Zūhal Çubukçu, elemen penting dalam kurikulum tersembunyi yang dimiliki di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan, sikap, dan norma-norma yang merupakan bagian penting dari fungsi sekolah. Nilai, keyakinan, sikap dan norma-norma ini tentu saja

³⁷Hasniati, “Analisis Muatan Radikalisme dalam Buku Teks PAI SMA” (Tesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 119.

³⁸Michael W. Apple, *Ideology and Curriculum* (New York: Routledge Falmer, 2004), 78–79.

sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik.³⁹ Artinya, karakter peserta didik seperti apa yang ingin dibentuk, tergantung pada nilai-nilai, keyakinan, sikap, dan norma-norma yang diinstallkan oleh pihak sekolah.

Kurikulum tersembunyi tidaklah nampak dalam sebuah lembaga pendidikan, karena tidak tertulis dalam dokumen kurikulum. Akan tetapi, justru di dalam kurikulum tersembunyi terkandung kekuatan untuk dapat mencetak kepribadian dan ideologi peserta didik. Oleh karena itu, nilai-nilai moderat seperti berperilaku normal (*tawassuʿ*) di dalam beragama, toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, memprioritaskan dialog, mengakomodir konsep-konsep modern yang secara substansial mengandung masalah, berpikir rasional berdasarkan wahyu, menafsirkan teks secara kontekstual, dan menggunakan ijtihad di dalam menafsirkan apa yang tidak termaktub di dalam al-Qurʿan atau Sunnah, memiliki sikap rukun dan kooperatif dengan kelompok-kelompok agama yang berbeda, dapat diinternalisasikan dalam proses instalasi ideologi Islam moderat.

Nilai-nilai tersebut perlu diinstallkan dalam kurikulum tersembunyi. Nilai-nilai itu merupakan abstraksi dari paham Islam moderat yang menjadi karakter Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks ini, penggunaan paradigma “mengindonesiakan Islam” dalam membangun kurikulum tersembunyi bagi lembaga pendidikan menjadi sebuah keniscayaan. Apabila nilai-nilai Islam moderat ini tidak terinstal dengan baik dalam kurikulum tersembunyi, maka karakter peserta didik yang dihasilkan pun akan menyimpang jauh dari karakter Islam moderat.

Menurut Masdar Hilmy, lembaga pendidikan seperti pesantren dewasa ini telah terfragmentasi menjadi pesantren “salafi” dan non-salafi. Berbeda secara diametral dengan pesantren non-salafi, pesantren “salafi” memiliki karakter, di antaranya, proses pembelajaran dan konten kurikulum bermuatan ideologis, menitikberatkan pada aksi amar maʿruf nahi munkar melalui pendekatan ekstrem, berpakaian jubah putih, celana panjang di atas mata kaki, serta berjenggot bagi santri laki-laki. Para santri “salafi”

³⁹Zühal Çubukçu, “The Effect of Hidden Curriculum on Character Education Process of Primary School Students,” *Educational Sciences: Theory & Practice* 12, no. 2 (n.d.): 1526–1534.

pun diajarkan tentang al-Qur'an dan al-Hadis sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam dengan membuang ajaran yang terdapat dalam khazanah pemikiran Islam Klasik. Selain itu, pesantren model ini pun mengkonstruksi kurikulum yang menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab kontemporer yang diperolehnya melalui jaringan "salafi" internasional. Di sini, mata ajar fiqh jihad bukan hanya diajarkan secara teori, tetapi juga praktik. Di Pesantren Al-Mukmin Ngruki, misalnya, para santri diajarkan seni bela diri. Seni bela diri ini secara tersembunyi diajarkan juga melalui praktiknya, seperti mengangkat senjata, bahkan operasi perang kota dan penyerangan terhadap musuh-musuh Allah.⁴⁰

Materi-materi kajian normatif tentang perlunya melakukan gerakan purifikasi, amar ma'ruf nahi munkar, dan berjihad di jalan Allah, lebih diajarkan secara intensif dan tersembunyi dibanding materi-materi lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika karakter peserta didik yang dihasilkan dari pembelajaran pesantren model "salafi" ini adalah lulusan yang memiliki ambisi purifikasionis lebih radikal dalam melakukan proses transformasi sosial-budaya. Mereka tak jarang terlibat langsung (*direct engagment*) dalam aksi perlawanan dan pembid'ahan di dalam masyarakat.⁴¹

Catatan Masdar Hilmy di atas perlu dikemukakan untuk menunjukkan bahwa dewasa ini terdapat lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang secara *hidden curriculum* mengajarkan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan ajaran dan paham Islam moderat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan Islam yang mengusung Islam moderat untuk lebih intensif lagi dalam menginternalisasikan paham dan ajaran Islam moderat. Dalam konteks ini, penggunaan paradigma "mengindonesiakan Islam" perlu lebih dikedepankan daripada penggunaan paradigma "mengislamkan Indonesia".

PENUTUP

Pendidikan nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dewasa ini dihadapkan pada tantangan yang sangat berat. Munculnya gerakan Islam transnasional, yang menyebarkan ideologinya

⁴⁰Masdar Hilmy, *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah* (Malang: Madani, 2016), 83-84.

⁴¹Ibid., 85.

melalui lembaga-lembaga pendidikan, membuat pendidikan nasional mendapat ancaman yang tidak dapat diremehkan. Islam moderat yang menjadi karakter Islam Indonesia harus diperkuat dan dipertahankan, selama bangsa dan negara ini masih bernama Indonesia. Dalam konteks ini, “Indonesianisasi Islam” menjadi keniscayaan yang dapat diperjuangkan untuk mempertahankan NKRI.

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia dituntut untuk dapat memainkan perannya dalam memperkuat Islam moderat melalui “Indonesianisasi Islam”. Peran yang dapat dilakukan lembaga pendidikan Islam dalam ranah ini adalah instalasi ideologi Islam moderat kepada peserta didik dalam proses pembelajarannya. Terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam instalasi ini, yaitu penekanan Islam moderat dalam merumuskan tujuan pendidikan, internalisasi nilai-nilai moderat dalam merancangbangun kurikulum tersembunyi, dan melakukan filterisasi materi ajar sehingga ideologi Islam moderat dapat diinstallasikan kepada peserta didik. Proses instalasi ideologi Islam moderat ini tentu saja bukan pekerjaan mudah. Di sini diperlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dengan kelompok-kelompok Islam kultural non-ideologis yang berparadigma “Indonesianisasi Islam”.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdallah. “Exclusivism and Radicalism in Schools: State Policy and Educational Politics Revisited.” *Studia Islamika* 23, no. 3 (2016).
- Ali, Muhammad. “Moderate Islam Movement in Contemporary Indonesia.” In *Islamic Thoughts and Movements in Contemporary Indonesia*, diedit oleh Rijal Sukma dan Clara Joewono. Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 2007.
- Apple, Michael W. *Ideology and Curriculum*. New York: Routledge Falmer, 2004.

- Ardhana, I Ketut. "Nasionalisasi Perusahaan: Peralihan dari Perusahaan Belanda ke Perusahaan Lokal di Bali." In *Membuka Jalan Keilmuan: Kusumanjali 80 Tahun Prof. Dr. Anak Agung Gde Putra Agung, S.U.*, diedit oleh A.A.A. Dewi Girindrawardani dan Slamet Trisila. Denpasar: Pustaka Larasan, 2015.
- Arifin, Syamsul. "Membendung Arus Radikalisasi di Indonesia." *Islamica* 8, no. 2 (Maret 2014).
- Arnold, Thomas W. *Sejarah Da'wah Islam*. Diterjemahkan oleh A. Nawawi Rambe. Jakarta: Widjaya, 1985.
- Azra, Azyumardi. "Bali and Southeast Asian Islam: Debunking the Myths." In *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*, diedit oleh Kumar Ramakrishna dan See Seng Tan. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2003.
- Bull, Ronald A. Lukens. *Islamic Higher Education in Indonesia*. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
- Burhani, Ahmad Najib. "Al-Tawassuṭ wa-l I'tidāl: The NU and Moderatism in Indonesian Islam." *Asian Journal of Social Science* 40, no. 5–6 (2012).
- Burhani, Ahmad Najib. "Pluralism, Liberalism and Islamism: Religious Outlook of the Muhammadiyah Islamic Movement in Indonesia." Tesis, Faculty of Humanities, University of Manchester, 2007.
- Çubukçu, Zühal. "The Effect of Hidden Curriculum on Character Education Process of Primary School Students." *Educational Sciences: Theory & Practice* 12, no. 2 (n.d.).
- Dewey, John. *Democracy and Education*. New York: The Macmillan Company, 1964.
- Effendi. "Politik Kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah (Studi Pemikiran Snouck Hurgronye)." *Jurnal TAPIS* 8, no. 1 (Juni 2012).
- Gutek, Gerald L. *Philosophical and Ideological Perspectives on Education*. New Jersey: Pentice-Hal, 1988.

- Hasniati. "Analisis Muatan Radikalisme dalam Buku Teks PAI SMA." Tesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Hasyim, Syafiq. "State and Religion: Considering Indonesian Islam as Model of Democratisation for the Muslim World." Berlin: the Friedrich Naumann Stiftung, 2013.
- Hilmy, Masdar. *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah*. Malang: Madani, 2016.
- Hilmy, Masdar. "Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU." *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1 (Juni 2013).
- International Crisis Group. "Indonesia: Industri Penerbitan Jemaah Islamiyah." *Crisis Group Asia Report* 147 (Pebruari 2008).
- Lindblad, J. Thomas. "The Importance of Indonesianisasi during the Transition from the 1930s to the 1960s." Amsterdam, 2002.
- Mansur. "Kontekstualisasi Gagasan Fiqh Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Telaah atas Pemikiran Kritis Yudian Wahyudi)." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46, no. 1 (Juni 2012).
- Mufid, Ahmad Syafi'i, ed. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2011.
- Muhadjir, Noeng. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. V. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003.
- Mujiburrahman. *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi*. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Munip, Abdul. "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (Desember 2012).
- Nasution, S. *Asas-Asas Kurikulum*. VI. Bandung: Jemmars, 1982.

- Nata, Abudin. "Islam Rahmatan li al-'Alamin sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community." dipresentasikan pada Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 7 Maret 2016.
- Presiden Jokowi. "Indonesia Sumber Pemikiran Islam Dunia." Diakses 9 September 2016. <https://www.kemenag.go.id/berita/387579/presiden-jokowi-indonesia-sumber-pemikiran-islam-dunia>.
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta. "Tanggung Jawab Negara terhadap Pendidikan Agama Islam." *Policy Brief*, September 2016.
- Ridwan, Nur Khalik. "Pancasila dan Deradikalisasi Agama." *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (Juni 2013).
- Solahudin. *The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema'ah Islamiyah*. Diterjemahkan oleh Dave McRae. Sydney: University of New South Wales Press Ltd, 2013.
- Suharto, Toto. "Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (September 2014).
- Suharto, Toto. "Pesantren Persatuan Islam 1983-1997 dalam Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat." Disertasi, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Suryanto, dan Djihad Hisyam. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000.
- Sutono, Agus. "Meneguhkan Pancasila sebagai Filsafat Pendidikan Nasional." *Jurnal Ilmiah CIVIS* 5, no. 1 (Januari 2015).
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.